

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Di Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi fondasi penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, moral, etika, serta pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. PPKn tidak hanya sekadar mata pelajaran, tetapi juga wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (D. A. Putri et al., 2024).

Dalam era globalisasi dan dinamika sosial politik yang kompleks, pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban warga negara menjadi semakin krusial. Arus informasi yang deras, perkembangan teknologi, serta perubahan nilai-nilai sosial budaya dapat memengaruhi cara pandang dan perilaku generasi muda terhadap konsep kewarganegaraan. Oleh karena itu, pendidikan PPKn memiliki tanggung jawab besar untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan agar mereka mampu menjadi warga negara yang aktif dan konstruktif (Istianah et al., 2024).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban warga negara masih perlu ditingkatkan. Berbagai studi dan observasi mengindikasikan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam implementasi pembelajaran PPKn (Sujana et al., 2021). Beberapa faktor yang menjadi tantangan antara lain metode pembelajaran yang kurang inovatif, materi

ajar yang kurang relevan dengan konteks kekinian, serta kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah pembelajaran PPKn yang cenderung teoritis dan hafalan. Siswa seringkali hanya terpaku pada definisi dan konsep-konsep abstrak tanpa memahami aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. siswa dapat meningkatkan kemampuan disiplin diri dan membuat siswa memahami peran dan fungsi ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga meningkatkan kesadaran dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. (Anak Agung Istri Dewi Adhi Utami et al., 2024). Akibatnya, pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban warga negara menjadi dangkal dan kurang bermakna. Mereka mungkin hafal pasal-pasal dalam UUD 1945, tetapi tidak mampu mengaitkannya dengan isu-isu sosial politik yang terjadi di sekitarnya.

Selain itu, metode pembelajaran yang kurang interaktif juga dapat menghambat pemahaman siswa. Pembelajaran yang didominasi oleh ceramah dan penugasan individu cenderung membuat siswa pasif dan kurang termotivasi untuk belajar. Padahal, pembelajaran PPKn seharusnya melibatkan siswa secara aktif dalam diskusi, debat, simulasi, atau studi kasus agar mereka dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, problem solving, dan pengambilan keputusan (Putra et al., 2025).

Kurikulum PPKn yang ada juga perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Materi ajar yang terlalu kaku dan tidak adaptif dapat membuat siswa merasa bosan dan kurang tertarik untuk belajar. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dalam

pengembangan materi ajar yang lebih kontekstual, aktual, dan relevan dengan isu-isu yang dihadapi oleh generasi muda (Nurhalisyah et al., 2024).

Di sisi lain, peran guru PPKn juga sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Guru PPKn tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan teladan bagi siswa. Guru PPKn yang kreatif dan inovatif mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menantang, serta mampu menginspirasi siswa untuk menjadi warga negara yang baik (Purwanti & Trisiana, 2024).

Selain itu, dukungan dari pihak sekolah dan keluarga juga sangat penting dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban warga negara. Sekolah perlu menyediakan fasilitas dan sumber belajar yang memadai, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan karakter dan nilai-nilai kewarganegaraan. Keluarga juga perlu berperan aktif dalam mendampingi siswa belajar, serta memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Safitri et al., 2024).

Mengingat pentingnya peran pembelajaran PPKn dalam membentuk warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn (Budiarta, 2022). Upaya-upaya tersebut meliputi pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kompetensi guru, penggunaan metode pembelajaran yang inovatif, penyediaan sumber belajar yang memadai, serta dukungan dari pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat (Anastasiya, 2025).

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Peran pembelajaran PPKn di kelas 7 SMPN 2 Abang sangat penting dalam meningkatkan

pemahaman siswa terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Melalui materi yang disampaikan secara terstruktur dan interaktif, siswa mulai memahami konsep dasar tentang hak serta kewajiban yang melekat sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Pembelajaran ini juga sering memanfaatkan pendekatan kolaboratif, seperti metode diskusi kelompok dan Think-Pair-Share, yang mendorong partisipasi aktif para siswa sehingga mampu mengembangkan kecakapan berpikir kritis dan sosial terkait isu-isu kewarganegaraan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Dalam proses pembelajaran, guru PPKn tidak hanya memberikan pengetahuan secara teoritis, tetapi juga membimbing siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, norma hukum, dan pentingnya keterlibatan sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Siswa diajak mendiskusikan contoh konkret penerapan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas. Upaya ini mendorong kesadaran bahwa selain memiliki hak, setiap individu juga wajib melaksanakan tanggung jawab demi terciptanya kehidupan berbangsa yang harmonis dan demokratis, sesuai tujuan utama pendidikan PPKn sebagai penyiapan generasi muda yang sadar dan peduli terhadap peran sosialnya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang peran pembelajaran PPKn dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban warga negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pendidikan PPKn di Indonesia, serta dapat menjadi bahan masukan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Dengan demikian, melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang efektif dan inovatif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran PPKn, serta dapat dirumuskan strategi-strategi yang tepat untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban warga negara, sehingga mereka mampu menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter Pancasila. Oleh karena peneliti mengangkat penelitian dengan judul **“Peran Pembelajaran PPKn Dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Pada Siswa Kelas 7 di SMPN 2 Abang”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penulis telah mengidentifikasi masalah-masalah berikut dengan penelitian ini:

1. Terdapat variasi yang signifikan dalam tingkat pemahaman siswa kelas 7 terhadap konsep hak dan kewajiban warga negara. Beberapa siswa menunjukkan pemahaman yang baik, sementara yang lain masih memiliki pemahaman yang terbatas atau bahkan kurang tepat. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti latar belakang keluarga, minat belajar, dan gaya belajar yang berbeda-beda
2. Metode pembelajaran PPKn yang diterapkan cenderung didominasi oleh metode ceramah dan penugasan individu. Metode ini kurang interaktif dan kurang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Akibatnya, siswa menjadi pasif dan kurang termotivasi untuk belajar.
3. Materi ajar PPKn yang digunakan terkadang kurang relevan dengan konteks kehidupan siswa sehari-hari. Contoh-contoh yang diberikan

seringkali terlalu abstrak dan sulit dipahami oleh siswa. Hal ini dapat membuat siswa merasa bosan dan kurang tertarik untuk belajar.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada peran pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban warga negara. Pembatasan masalah dilakukan dengan memfokuskan penelitian pada siswa kelas 7 di SMPN 2 Abang. Pemilihan kelas 7 didasarkan pada pertimbangan bahwa siswa pada jenjang ini baru memasuki masa transisi dari sekolah dasar, sehingga pemahaman awal mereka tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Lokasi penelitian dibatasi di SMPN 2 Abang dengan alasan kemudahan aksesibilitas dan efisiensi waktu serta sumber daya, serta untuk mendapatkan gambaran yang lebih spesifik mengenai implementasi pembelajaran PPKn di sekolah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran yang mendalam tentang efektivitas pembelajaran PPKn dalam membentuk pemahaman kewarganegaraan siswa kelas 7 di SMPN 2 Abang.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian masalah di atas, penulis penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pemahaman siswa kelas 7 SMPN 2 Abang tentang hak dan kewajiban warga negara sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran PPKn?

2. Bagaimana efektivitas pembelajaran PPKn yang dilaksanakan di SMPN 2 Abang dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 7 tentang hak dan kewajiban warga negara?
3. Apa faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pembelajaran PPKn dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 7 SMPN 2 Abang tentang hak dan kewajiban warga negara?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, penulis mengidentifikasi beberapa tujuan penelitian ini. Tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat pemahaman siswa kelas 7 SMPN 2 Abang mengenai hak dan kewajiban warga negara sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran PPKn.
2. Mengidentifikasi efektivitas pembelajaran PPKn dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 7 SMPN 2 Abang tentang hak dan kewajiban warga negara.
3. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran PPKn yang memengaruhi pemahaman siswa kelas 7 SMPN 2 Abang tentang hak dan kewajiban warga negara.
4. Merumuskan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PPKn dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 7 SMPN 2 Abang tentang hak dan kewajiban warga negara.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penulis, pembaca, dan masyarakat diharapkan memperoleh manfaat dari adanya penelitian ini. Oleh karena itu, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, pembelajaran PPKn memiliki peran krusial dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 7 SMPN 2 Abang tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. PPKn bukan hanya memberikan pengetahuan tentang peraturan dan hukum, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan keadilan sosial. Dengan memahami hak-hak mereka (seperti hak mendapatkan pendidikan, perlindungan hukum, dan kebebasan berpendapat), siswa akan lebih sadar akan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, pemahaman tentang kewajiban (seperti membayar pajak, menaati hukum, dan menjaga persatuan) akan membentuk siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, berkontribusi positif bagi bangsa, serta mampu menghargai perbedaan dan menjaga harmoni sosial di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis dapat memperoleh cara baru dalam menciptakan inovasi terhadap pembelajaran PKN untuk meningkatkan hak dan kewajiban warga negara bagi siswa di tingkatan pendidikan menengah pertama.

b. Bagi Pembaca

Pembaca dapat memperoleh informasi secara factual terhadap pentingnya peranan pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban warga negara.

